

IMPLEMENTASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN (P2KP II TAHAP II) DI KELURAHAN PASIR KIDUL KECAMATAN PURWOKERTO BARAT

Dian Woro, Eni Nur Aeni, S. Bakti Istiyanto,

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial terbesar di Indonesia. Karena itu, pemerintah berupaya memerangi kemiskinan tersebut dengan memberikan banyak program pembangunan, salah satunya P2KP yang bertujuan untuk mengurangi tingkat masyarakat miskin perkotaan termasuk di Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat. Dalam implementasinya disyaratkan ada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berbasis pada partisipasi masyarakat. Program dimulai sosialisasi, pemetaan permasalahan, penyusunan prioritas program, dan tahap pelaksanaan yang berbasis pada permasalahan lingkungan, permasalahan ekonomi dan permasalahan sosial.

Kata Kunci : Kemiskinan, Perencanaan, Implementasi Program

LATAR BELAKANG

Kemiskinan hingga saat ini masih menjadi *issu* global. Artinya, kemiskinan tidak saja menjadi masalah pokok di Negara Dunia Ketiga, tetapi kemiskinan juga (masih) menjadi persoalan di Negara Industri Maju. Sementara itu kemiskinan merupakan momok di Negara Dunia Ketiga, karena merupakan masalah sosial terbesar. Hampir di semua negara berkembang, 10, 20, atau paling banyak 30 persen penduduk dapat menikmati hasil pembangunan, sisanya, mayoritas penduduk hidup miskin. Strategi pembangunan yang diterapkan tidak menyumbang apapun bagi kesejahteraan rakyat miskin. Meskipun telah banyak upaya penanganan kemiskinan dilakukan khususnya di Negara Dunia Ketiga, namun kemiskinan tetap saja merupakan masalah utama di Negara Dunia Ketiga hingga saat ini.

Di Indonesia, permasalahan kemiskinan sudah sangat mendesak untuk ditangani, khususnya di perkotaan, karena memiliki tingkat kerawanan yang lebih tinggi dibandingkan pedesaan. Pasa dasarnya, konsep kemiskinan bersifat multidimensial mencakup dimensi politik, sosial, lingkungan, ekonomi, dan aset. Dilihat dari sisi profil kemiskinan (*poverty profile*) masyarakat, kemiskinan tidak hanya menyangkut persoalan kesejahteraan (*welfare*) semata, tetapi kemiskinan menyangkut persoalan kerentanan (*vulnerability*), ketidakberdayaan (*powerless*), tertutupnya akses kepada pelbagai peluang kerja, menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk kebutuhan konsumsi, angka ketergantungan yang tinggi, rendahnya akses terhadap pasar, dan kemiskinan terefleksi dalam budaya kemiskinan yang diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya

(Tjokroawinoto, 1987:25). Kemiskinan merupakan kondisi yang jauh dari kehidupan yang sejahtera dan rentan yaitu tidak memiliki daya kemampuan yang cukup di banyak bidang.

Orientasi penanggulangan kemiskinan (pembangunan) yang selama ini dilakukan di Indonesia lebih menitikberatkan pada salah satu dimensi saja yang berarti mencerminkan pendekatan program yang bersifat parsial, sektoral, *charity* dan tidak menyentuh akar kemiskinan itu sendiri. Pada dasarnya program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ada dua cara. Pertama, dengan mengurangi beban hidup orang rakyat miskin, yang dilaksanakan melalui dana-dana subsidi seperti subsidi BBM, listrik, dan lain-lain. Kedua, upaya meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, yaitu melalui program-program yang lebih menumbuhkan kemandirian masyarakat secara bersama-sama dan mewujudkan pembangunan yang berlanjutan (*sustainable*). Salah satu dari program ini adalah P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan).

P2KP mengembangkan konsep penanggulangan kemiskinan di perkotaan secara *comprehensive* dan utuh dengan mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui proses *tranfortasi sosial* dari kondisi masyarakat miskin menjadi masyarakat madani. Inti dari konsep P2KP adalah bahwa kemiskinan pada dasarnya tidak mungkin diatasi dengan bantuan pihak luar semata, namun hanya bisa diselesaikan oleh upaya masyarakatnya itu sendiri, yang telah mampu mentransformasikan dirinya ke arah tatanan masyarakat madani (*civil society*), yakni tatanan masyarakat yang mampu mengurus persoalannya sendiri (*self community management*) (Buku Pedoman Umum P2KP, 2004).

Di sinilah pentingnya peran pelaksana yang dituntut kemampuannya untuk melaksanakan program, dimana mereka harus dapat melakukan pendekatan kepada masyarakat agar dapat berkomunikasi langsung dengan mereka. Partisipasi masyarakat perlu juga mendapatkan perhatian, walaupun masyarakat sudah dapat memahami maksud dan tujuan program tersebut, tetapi jika kesadaran mereka untuk terlibat dalam program tersebut belum terbentuk maka Program P2KP tidak akan berjalan dan mencapai hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan.

Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat ini berpengaruh terhadap kondisi lingkungan dan sosial masyarakat, sehingga memerlukan suatu perbaikan yang diharapkan mampu dilakukan P2KP. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengetahui tentang implementasi dan partisipasi masyarakat dalam Program P2KP di Kelurahan Pasir Kidul.

Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana implementasi dan partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam Program P2KP II Tahap II di Kelurahan Pasir Kidul? “

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dan partisipasi masyarakat dalam Program P2KP II tahap II di Kelurahan Pasir Kidul.

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya lingkup penelitian analisis deskriptif terutama yang berkaitan dengan penggunaan teori komunikasi pembangunan.

Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan penjelasan pelaksanaan program, serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program P2KP serta mampu memberikan referensi bagi pihak-pihak yang memerlukannya, khususnya informasi mengenai P2KP.

TINJAUAN PUSTAKA

Komunikasi Pembangunan

Komunikasi dan pembangunan merupakan dua hal yang saling berhubungan sangat erat. Kedudukan komunikasi dalam konteks pembangunan adalah “ *as an integral part of development, and communication as a set of variables instrumental in bringing about development* “ (Roy dalam Rogers, 1985).

Pembangunan adalah perubahan menuju pola masyarakat yang memungkinkan terwujudnya nilai-nilai manusiawi yang lebih baik, yang memungkinkan suatu masyarakat memperluas fungsi pengawasannya terhadap lingkungan mereka serta atas tujuan politik mereka sendiri, dan memperkenankan setiap pribadi untuk mengatur diri secara lebih luas (Inayatullah, dalam Rogers, 1985:162). Sedangkan komunikasi diperlukan dalam menilai perubahan-perubahan yang diusulkan dan kemudian dalam menggerakkan orang-orang untuk bertindak, baik untuk menolak maupun untuk mewujudkan perubahan-perubahan tersebut (Rogers 1985 : 162).

Dalam komunikasi pembangunan yang diutamakan adalah kegiatan mendidik dan memotivasi masyarakat, bukannya memberi laporan yang tidak realistis dari fakta-fakta atau sekedar penonjolan diri. Tujuan komunikasi pembangunan yang diutamakan adalah untuk menanamkan gagasan-gagasan sikap mental dan mengajarkan ketrampilan yang

dibutuhkan oleh suatu negara berkembang. Secara pragmatis, kata Quebral, dapatlah dirumuskan bahwa komunikasi pembangunan adalah komunikasi yang dilakukan untuk melaksanakan rencana pembangunan suatu negara (dalam Nasution, 1996 : 128).

Dengan demikian pembangunan di Indonesia adalah rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia harus bersifat pragmatik yaitu suatu pola yang membangkitkan inovasi bagi masa kini dan yang akan datang. Dalam hal ini tentunya fungsi komunikasi harus berada di garis depan untuk merubah sikap dan perilaku manusia Indonesia sebagai pemeran utama pembangunan, baik sebagai subjek maupun sebagai objek pembangunan. Berdasarkan pengamatan terhadap perkembangan konsep komunikasi pembangunan, maka dapat dilihat dalam arti luas dan terbatas. Dalam arti luas, komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik di antara masyarakat dengan pemerintah, dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Sedangkan dalam arti terbatas, komunikasi pembangunan merupakan segala upaya dan cara serta teknik penyampaian gagasan dan ketrampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan dan diwujudkan pada masyarakat yang menjadi sasaran dapat memahami, menerima dan berpartisipasi dalam pembangunan (Nasution, 1996 : 92).

Strategi pembangunan menentukan strategi komunikasi, maka makna komunikasi pembangunan pun bergantung pada modal atau paradigma pembangunan yang dipilih oleh suatu negara. Peranan komunikasi pembangunan telah banyak dibicarakan oleh para ahli, pada umumnya mereka sepakat bahwa komunikasi mempunyai andil penting dalam pembangunan. Rogers (1985) menyatakan bahwa, secara sederhana pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak dari suatu bangsa.

Implementasi

Implementasi merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijaksanaan. Seperti yang diungkapkan oleh Udjodi yakni: “pelaksanaan kebijaksanaan adalah suatu yang penting bahkan mungkin lebih penting dari pada pembuatan kebijakan, kebijakan akan sekedar berupa impian atau rancangan bagus yang tersimpan dalam arsip jika tidak dilaksanakan atau diimplementasikan” (dalam Wahab, 1990 : 45). Tanpa adanya implementasi, kebijaksanaan hanya sekedar suatu keputusan belaka yang tidak memiliki manfaat bagi orang banyak jika tidak dilaksanakan. Kebijakan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan hanya

akan menjadi sebuah rencana jika tidak benar-benar diimplementasikan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Meter dan Horn (dalam Wibawa dkk, 1994 : 15) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dirumuskan di dalam kebijakan. Jadi tujuan yang akan dicapai akan melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan yang bersangkutan.

Sebagaimana diketahui, implementasi kebijakan lebih menekankan pada proses kebijakan daripada melihat dampak kebijakan yang dihasilkan. Wibawa (1994:96) melihat implementasi dari dua perspektif yaitu melalui pendekatan kepatuhan (*compliance*) dan apa yang terjadi (*what happening*). Dalam pendekatan kepatuhan di dalamnya akan melihat sejauh mana pelaksanaan kebijakan sesuai dengan apa yang digariskan dalam program atau proyek. Sedangkan pendekatan apa yang terjadi (*what happening*) melihat kebijaksanaan sebagaimana adanya.

George C. Edward (dalam Wibawa, 1994) mengungkapkan bahwa persyaratan yang dibuat bagi suksesnya penerapan kebijakan serta hambatan utama yang dihadapi dalam penerapan kebijakan tersebut. Ada empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu:

- a. Komunikasi
- b. Sumber Daya
- c. Oposisi / sikap
- d. Struktur birokrasi

Adapun kaitannya dengan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), untuk variabel komunikasi berperan penting dalam implementasi program tersebut khususnya antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, misalnya hubungan komunikasi antara Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dengan fasilitator dengan koordinator, dengan Unit Pelayanan (UP), dengan Konsultan Manajemen Wilayah (KMW), dan dengan masyarakatnya. Untuk variabel sumber daya, juga berperan penting sebagai penunjang proses implementasi terutama dilihat dari faktor kondisi ekonomi masyarakat dan kondisi alamnya. Sedangkan variabel oposisi/ sikap berperan dalam implementasi dilihat dari sikap masyarakat dalam merespon program P2KP, selain itu sikap dari aparat pelaksana program dan sukarelawan juga cukup berperan penting. Dalam struktur birokrasi yang mengutamakan efisiensi dan efektifitas akan dapat memberikan kejelasan tugas dan wewenang dari atasan hingga bawahannya.

Partisipasi Masyarakat

Dalam pelaksanaan program pembangunan, partisipasi masyarakat sangat mutlak diperlukan untuk tercapainya tujuan-tujuan program. Partisipasi masyarakat tidak hanya berupa dukungan melainkan juga sebagai koreksi dan peringatan karena seringkali program pembangunan kurang mempertimbangkan aspirasi masyarakat bahkan kadang merugikan masyarakat. Program yang baik dengan sendirinya akan mendapat dukungan masyarakat. Demikian pula program P2KP di kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat, partisipasi masyarakat ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan program tersebut.

Mubyarto (dalam Ndraha, 1990 : 102) mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri. Begitu juga Tjokroamidjoyo (1987 : 207) mengartikan partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat dalam penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah, keterlibatan masyarakat dalam memikul dan memetik manfaat pembangunan.

Konsep partisipasi mengandung makna yang sangat luas dan arti yang mendalam. Dalam proses pembangunan, partisipasi berfungsi sebagai masukan dan keluaran. Sebagai masukan, partisipasi berfungsi menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri, sedangkan sebagai keluaran partisipasi dapat digerakkan atau dibangun (Ndraha, 1990 : 109).

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan keadaan/ situasi yang paling dikhawatirkan oleh hampir semua negara di dunia, karena kemiskinan merupakan awal dari rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk suatu negara. Definisi kemiskinan sendiri secara umum adalah situasi/ kondisi yang dialami oleh seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap mustahil (Kemiskinan dan Penanggulangannya. Panduan P2KP, 2004 : 2). Dengan kata lain, definisi kemiskinan ialah kondisi seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kemiskinan mempunyai pengertian yang luas dan tidak mudah untuk mengukurnya. Secara umum ada dua macam ukuran miskin yang biasa digunakan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif (Arsyad dalam Widodo, 2006 : 298):

1. Kemiskinan Absolut
2. Kemiskinan Relatif

Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

Program P2KP merupakan bentuk pemaduan antara beberapa program yang jauh sebelumnya telah dibuat khusus untuk pembangunan di wilayah perkotaan, seperti *Kampung Improvement Programme (KIP)*, *Community Based Development (CBD)*, *Pembangunan Perumahan Bertumpu Pada Kelompok (P2BPK)* dan lain-lain. Dengan demikian program ini dirancang berdasarkan hasil belajar dan sekaligus evaluasi dari program-program sebelumnya secara konseptual program P2KP sangatlah idealis.

P2KP mengembangkan konsep penanggulangan kemiskinan perkotaan secara *comprehensive* dan utuh dengan mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui proses transformasi sosial dan kondisi masyarakat miskin menjadi masyarakat mandiri dan harapan akhirnya menjadi masyarakat madani. Inti dari konsep P2KP adalah bahwa kemiskinan pada dasarnya tidak mungkin diatasi dengan bantuan pihak luar semata, namun hanya bisa diselesaikan oleh upaya masyarakat itu sendiri, yang mampu mentransformasikan dirinya ke arah tatanan masyarakat madani (*civil society*), yakni tatanan masyarakat yang mampu mengurus persoalannya sendiri (*self community management*).

Program penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu model pendekatan pembangunan yang menerapkan proses kemampuan warga. P2KP sebagai salah satu program pemberdayaan memiliki visi “terwujudnya masyarakat madani yang maju, mandiri dan sejahtera dalam lingkungan pemukiman sehat, produktif dan lestari”. Adapun misi yang diemban adalah “membangun masyarakat madani yang mampu menjalin kebersamaan dan sinergi dengan pemerintah maupun kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan secara efektif dan mampu mewujudkan terciptanya lingkungan pemukiman yang tertata, sehat, produktif dan berkelanjutan.

Berangkat dari visi dan misi tersebut, maka P2KP mempunyai harapan besar dengan terwujudnya masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera dalam lingkungan pemukiman yang sehat, produktif dan berkesinambungan. P2KP percaya bahwa cita-cita tersebut akan terwujud apabila terjadi sinergi yang utuh antara masyarakat, kelompok peduli dengan pemerintah. Untuk itulah P2KP akan mendampingi masyarakat agar mampu menjalin kerjasama dan sinergi dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan model riset terpancang yaitu riset kualitatif dimana kegiatan pengumpulan data sudah

diarahkan sesuai dengan tujuan penelitian dan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam proposal dan sudah dibatasi terlebih dahulu aspek-aspek yang dipilihnya (Sutopo, 1988:15). Sasaran penelitian ini adalah fasilitator/ tim penyuluh (konsultan dari LSM/ Lembaga Independent), anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Pelaksana program yang terlibat langsung (PEMDA dan masyarakat sebagai media belajar dan perencana, pelaksana, sekaligus pengawas) dan masyarakat yang menerima program P2KP di Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas.

Adapun informan dalam penelitian adalah :

1. Masyarakat yang mengetahui proses P2KP dari awal maupun yang tergabung dalam relawan/ tim fasilitator.
2. Masyarakat penerima manfaat.
3. Pelaku utama pengelola program P2KP yaitu anggota-anggota BKM.
4. Pihak penyelenggara dan Konsultan Koordinator (Korkot) Kabupaten Banyumas dan Tim Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (TPKD) BAPPEDA Kabupaten Banyumas

Untuk teknik pengumpulan data digunakan wawancara, observasi, studi dokumentasi.

Untuk menguji kemantapan dan keabsahan data yang telah berhasil dikumpulkan, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber.

PEMBAHASAN

1. Perencanaan Kegiatan

Proses perencanaan dalam rangka pelaksanaan program P2KP di Kelurahan Pasir Kidul pada dasarnya menggunakan perencanaan partisipatif. Dimana perencanaan partisipatif merupakan suatu tata cara perencanaan yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Dalam praktik perencanaan partisipatif ini merupakan serangkaian kegiatan pertemuan atau rembug warga yang intensif yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghasilkan rencana pembangunan yang partisipatif (Buku Petunjuk Teknis Pelaksana Fasilitator, 2005:Lampiran 8-1). Untuk P2KP ini berarti rencana penanggulangan kemiskinan atau program penanggulangan kemiskinan (Pronangkis) atau sering disebut juga "*community development plan*" berdasarkan perencanaan partisipatif hasil pemetaan swadaya, yakni penilaian kebutuhan dan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

Tujuan dari perencanaan partisipatif adalah masyarakat bersama-sama belajar merumuskan dan memutuskan langkah-langkah pembangunan yang perlu dilakukan untuk membangun komunitas mereka dan khususnya menanggulangi kemiskinan yang masih dialami oleh sebagian warga (pemberdayaan). Serta menghasilkan suatu rencana pembangunan yang komprehensif yang merupakan hasil kesepakatan bersama.

Langkah-langkah perencanaan partisipatif Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) adalah

- a. Pengkajian hasil pemetaan swadaya dan menyiapkan draft rencana Pronangkis. Langkah pengkajian hasil pemetaan swadaya adalah proses yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengidentifikasi masalah, potensi dan kebutuhan riil mereka sendiri secara partisipatif. Hasil-hasil pemetaan swadaya dari tingkat RT, RW atau Dusun Kelurahan dibahas bersama untuk kemudian disepakati daftar prioritas masalah, potensi dan kebutuhan nyata (riil) masyarakat setempat. Berdasarkan hasil pemetaan swadaya kemudian kesepakatan tersebut dicantumkan pada draft rencana Pronangkis.
- b. Lokakarya perencanaan partisipatif Pronangkis oleh *stakeholders* tingkat kelurahan, yang merupakan proses yang dilakukan seluruh *stakeholders* masyarakat kelurahan untuk menyepakati Perencanaan Jangka Menengah (PJM) dan rencana tahunan Pronangkis melalui identifikasi pemecahan masalah dan pemanfaatan potensi secara terpadu serta sistematis. Proses ini dilakukan dengan membahas draft rencana Pronangkis yang disiapkan oleh Tim pemetaan swadaya, Kader dan BKM.
- c. Pemasarakatan rencana Pronangkis. Hasil-hasil rencana Pronangkis di tingkat kelurahan disebarluaskan oleh BKM ke seluruh lapisan masyarakat dan ditempelkan di tempat-tempat yang strategis. *Stakeholders* memberikan masa tenggang beberapa hari untuk menampung pendapat, saran, kritik dan masukan dari masyarakat luas.
- d. Perbaikan partisipatif. Selama masa tenggang tersebut, masyarakat luas diberi kesempatan untuk memberikan masukan perbaikan naskah perencanaan partisipatif bersama BKM, tim pemetaan swadaya dan kader masyarakat. Usulan serta masukan yang konstruktif diakomodasi dalam naskah rencana Pronangkis.
- e. Konsensus masyarakat. Berdasarkan usulan perbaikan partisipatif oleh masyarakat, BKM mengkoordinir pertemuan *stakeholders* tingkat kelurahan untuk

membahas dan menyepakati consensus rencana (PJM dan tahunan) Pronangkis. Hasil konsesnsus tersebut disebarluaskan kepada seluruh masyarakat dan pihak-pihak terkait, sebagai landasan dan pertimbangan utama pelaksanaan P2KP di wilayah tersebut.

- f. Lokakarya keterpaduan Pronangkis di tingkat kecamatan. Hal ini dimaksudkan untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan Pronangkis antar wilayah Kelurahan, maupun antara Pronangkis kelurahan dengan Program atau rencana kegiatan Pemerintah Kecamatan.
- g. Konsultasi usulan Pronangkis masyarakat dengan Pemerintah Kota. BKM-BKM bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota/ Kabupaten mengadakan lokakarya perencanaan partisipatif tingkat kota/ kabupaten sebagai sarana konsultasi antara usulan Pronangkis masyarakat dengan rencana program. Hasil konsultasi ini adalah:
 - i) Inventarisasi prakarsa dan program masyarakat sebagai bahan bagi pemerintah untuk kebijakan penanggulangan kemiskinan.
 - ii) Inventarisasi program dan kebijakan pemerintah kota/ kabupaten sebagai bahan bagi masyarakat untuk melakukan proses persiapan sosial.
 - iii) Inventarisasi program masyarakat (pronangkis) untuk disampaikan melalui mekanisme Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) untuk kegiatan yang diusulkan dapat didukung melalui akses dana APBD kota/ kabupaten

Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan di Kelurahan Pasir Kidul baik berupa permasalahan kemiskinan, permasalahan ekonomi, maupun permasalahan sosial diupayakan pemecahannya guna menekan angka kemiskinan kota melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan.

2. Implementasi Kegiatan

P2KP mencoba melakukan terobosan dengan pemikiran bahwa masalah kemiskinan lebih diakibatkan dari hancurnya modal sosial dan sendi-sendi kemasyarakatan yang ditandai dengan lunturnya nilai-nilai universal kemanusiaan (kejujuran, kerelawanan, kepedulian dan lain-lain), sehingga penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui program “pembangkitan” nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Secara umum strategi penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Pasir Kidul dalam upaya mengatasi permasalahan lingkungan, sosial, maupun ekonomi diarahkan pada :

- a. Peningkatan kesejahteraan warga, khususnya warga miskin.

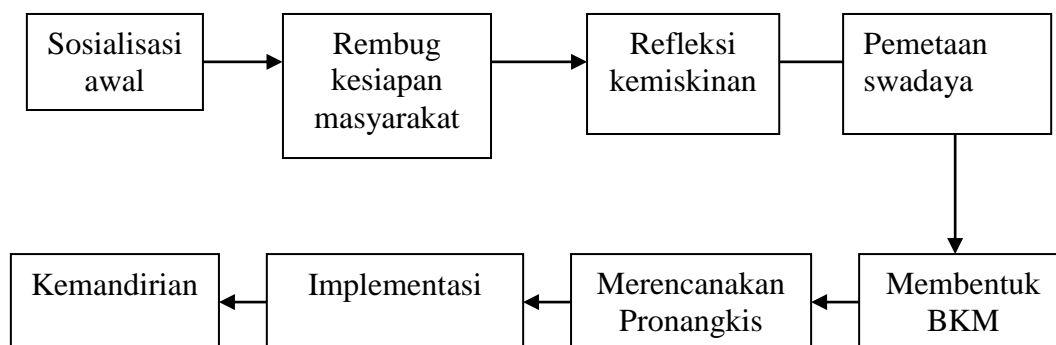
Peningkatan ini akan dapat dicapai melalui pemenuhan berbagai prasarana dan sarana dasar perkotaan secara layak. Sebagaimana diketahui bersama bahwa infrastruktur merupakan kebutuhan vital dalam menunjang berbagai kegiatan, dengan terselenggaranya Prasarana dan Sarana Dasar Perkotaan (PSDP) yang layak diharapkan dapat menunjang aktivitas warga dalam berproduksi, dan meningkatkan efektivitas warga dalam melakukan kegiatan.

b. Pemberdayaan warga dalam pembangunan.

Strategi penanggulangan kemiskinan yang kedua yaitu pemberdayaan warga untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan proses pembangunan yang dilalui, yaitu:

- Identifikasi permasalahan lingkungan, sosial dan ekonomi.
- Pengorganisasian sumber-sumber potensi yang dimiliki untuk menunjang pembangunan.
- Penyusunan rencana program kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan riil.
- Pelaksanaan/ realisasi program kegiatan agar tidak terjadi penyimpangan.

Pada pelaksanaan P2KP terdapat serangkaian kegiatan, baik sebagai bagian dari siklus pokok P2KP maupun kegiatan khusus, yang dilaksanakan secara berkala dan secara terus-menerus atau berkelanjutan selama masa proyek P2KP. Berikut proses/siklus pelaksanaan P2KP di Kelurahan Pasir Kidul.



Secara umum berbagai kondisi yang terkait dengan kemiskinan untuk penentuan program penanggulangan kemiskinan tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut :

a. Permasalahan lingkungan

Permasalahan lingkungan di Kelurahan Pasir Kidul dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Ketersediaan penerangan jalan
2. Jaringan jalan

3. Pembuatan saluran air bersih
4. Pembuatan MCK
5. Persampahan
6. Perbaikan saluran irigasi
7. Perbaikan perumahan tidak layak huni

b. Permasalahan Ekonomi

Berbagai permasalahan perekonomian warga yang terdapat di Kelurahan Pasir Kidul berkaitan dengan jenis mata pencaharian dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Pedagang
2. Industri rumah tangga
3. Pertukangan
4. Buruh
5. Peternak
6. Tukang las/ bengkel

c. Permasalahan sosial

Permasalahan sosial yang ada di Kelurahan Pasir Kidul dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu santunan orang jompo, biaya pendidikan dan santunan kesehatan.

3. Pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah kemiskinan adalah melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, misalnya peningkatan usaha ekonomi masyarakat. Sedangkan unsur utama dari efektifitas kegiatan peningkatan usaha ekonomi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat akan tergantung dan ditentukan oleh faktor kepercayaan, baik kepercayaan masyarakat itu sendiri maupun kepercayaan pihak luar kepada masyarakat. Adanya kepercayaan pihak luar tersebut menjadi modal utama yang dapat mempermudah masyarakat upaya mengakses berbagai peluang sumber daya yang dimiliki pihak luar, melalui kemitraan dan kerjasama dalam pelaksanaan program-program di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan (*channeling program*). Dalam konteks inilah masyarakat diharapkan dapat memiliki sarana atau wadah kepercayaan bersama, yakni Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) merupakan nama generik untuk suatu lembaga masyarakat warga di tingkat kelurahan, yang keberadaannya didasarkan kebutuhan masyarakat, dipercaya oleh masyarakat, dan mencerminkan kepemimpinan

kolektif berbasis moral sebagai representasi dari seluruh warga kelurahan yang paling dapat dipercaya. Dengan demikian BKM merupakan “wadah” atau lembaga yang menjadi tempat untuk membangun sinergi segenap potensi masyarakat dan benar-benar dibangun dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat dengan berlandaskan nilai-nilai universal (keikhlasan, kerelawanan, keadilan, kejujuran, dan lain-lain) (Petunjuk Teknis Pelaksana BKM, 2005:4).

Dalam konteks pelaksanaan P2KP, keberadaan dan berfungsinya lembaga masyarakat warga yang mengakar, representatif dan dapat dipercaya (secara generik disebut BKM) merupakan prasyarat bagi proses pembelajaran yang difasilitasi P2KP, termasuk dalam hal penyaluran serta pengelolaan dana publik yang bersifat titipan/waqaf dari P2KP kepada masyarakat di Kelurahan sasaran. BKM pada akhirnya diharapkan akan tetap mampu mandiri dan berkelanjutan menjalankan fungsinya sebagai motor penggerak dalam melembagakan dan membudayakan kembali nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip kemasyarakatan sebagai nilai utama yang melandasi aktifitas penanggulangan kemiskinan di perkotaan secara berkelanjutan serta mampu mengorganisir dan mensinergikan segenap potensi masyarakat bagi kepentingan perbaikan kesejahteraan bersama maupun mengakses berbagai peluang sumber daya luar (Petunjuk Teknis Pelaksana BKM, 2005:6).

BKM sebagai kumpulan dari orang-orang yang paling dapat dipercaya dan diharapkan benar-benar mampu memperjuangkan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan seluruh warga, terutama warga miskin, sehingga akan dapat memotivasi masyarakat untuk secara sukarela terlibat aktif dan intensif dalam setiap proses pengambilan keputusan dan kebijakan penting yang menyangkut diri mereka sendiri. Artinya, warga memiliki akses yang memadai ke berbagai sumberdaya kunci yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak, termasuk akses-akses informasi dan sumber daya. Jadi posisi BKM dalam tatanan kemasyarakatan di kelurahan adalah sebagai wadah sinergi masyarakat untuk sarana perjuangan dan aspirasi warga masyarakat kelurahan yang lebih dititikberatkan pada upaya penanggulangan kemiskinan dan pembangunan lingkungan pemukiman di wilayahnya.

Proses pembentukan BKM sangat penting dan signifikan, karena akan menentukan keberadaan dan keberlanjutan BKM selanjutnya. BKM yang dibentuk sesuai kebutuhan serta kepentingan masyarakat, melalui proses yang partisipatif dan demokratis, akan berpotensi lebih mengakar, representatif dan dipercaya oleh masyarakat dalam rangka

akses *channeling program*. Oleh karena itu, proses pembentukan BKM tidak dapat dilakukan oleh hanya sekelompok kecil warga atau pihak tertentu yang mengatas namakan seluruh masyarakat. Kegiatan proses pembentukan BKM dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Menyusun Draft Anggaran Dasar dan Tata Tertib Pemilihan
2. Serangkaian Focus Group Decision (FGD) kepemimpinan moral dan pemilihan utusan warga.
3. Rembug warga di tingkat kelurahan untuk pembentukan BKM dan pemilihan anggota-anggota BKM.
4. Akuntabilitas dan legimitasi pembentukan BKM serta pemilihan anggota.
5. Legalisasi BKM

Dalam tiap langkah kegiatan P2KP harus dilakukan secara partisipatif sehingga mampu membangun rasa kepemilikan dan proses belajar melalui bekerjasama. Partisipasi dibangun dengan menekankan proses pengambilan keputusan oleh warga, mulai dari tataran ide/gagasan, perencanaan, pengorganisasian, pemupukan sumberdaya, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pemeliharaan. Oleh karena itu, pemilihan dan penetapan BKM yang dilakukan dari tingkat unit satuan terkecil (RT) sampai tingkat kelurahan dilakukan dengan cara demokratis yang terlebih dahulu warga masyarakat diperbolehkan mengajukan calon pengurus BKM, kemudian diadakan pemilihan pengurus BKM (satu orang satu suara).

KESIMPULAN

1. Berbagai tahapan yang merupakan proses untuk menuju masyarakat madani di Kelurahan Pasir Kidul telah dilalui, yaitu refleksi kemiskinan (RK) dan pemetaan swadaya (PS), kedua hal tersebut merupakan salah satu bahan utama untuk menyusun rencana kegiatan yang sederhana, jelas dan wajar yang dijabarkan ke dalam PJM Pronangkis. PJM Pronangkis mengandung tiga muatan utama yang telah direncanakan dan diupayakan dalam program pelaksanaannya, yaitu pemberdayaan di bidang ekonomi, sosial dan pemberdayaan prasarana fisik lingkungan atau yang lebih dikenal dengan “tridaya”.
2. Sebagai wujud komitmen masyarakat dalam kerangka membangun pondasi kemandiriannya, jenis klasifikasi kegiatan yang direncanakan harus senantiasa diiringi dengan kontribusi keswadayaan masyarakat sehingga pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) merupakan suatu keharusan tidak saja sebagai prasyarat P2KP, akan tetapi diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan

kemiskinan yang direncanakan tidak hanya sekedar didasarkan pada “daftar keinginan” sekelompok atau pihak tertentu, melainkan benar-benar berbasis kebutuhan nyata seluruh lapisan masyarakat.

3. PJM Pronangkis sangat diperlukan karena merupakan pedoman dalam prioritas kegiatan yang berdasarkan optimalisasi potensi, keberlanjutan program disamping sebagai sarana penyelesaian masalah. PJM harus disusun bersama, dilaksanakan bersama, dinikmati bersama yang melibatkan unsur BKM, relawan, keterwakilan RT/ RW, keterwakilan perempuan, warga miskin, maupun aparat/ lembaga yang terkait. Sebelum PJM disepakati BKM, PJM diinformasikan terlebih dahulu kepada masyarakat melalui media bazar program, yaitu pemaparan program-program penanggulangan kemiskinan. masukan dari masyarakat tersebut yang kemudian menjadi dasar pembentukan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Setelah direvisi, PJM disepakati dengan menyusun prioritas berdasarkan tingkat kemendesakan, kepedulian, keterlibatan, dan ketersediaan dana. Kegiatan inilah yang menjadikan partisipasi masyarakat Kelurahan Pasir Kidul dalam P2KP telah terlaksana cukup baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Nasution, Zulkarnaen, 1996. *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ndraha, Taliz Uduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Rogers, Everett M, 1985. *Komunikasi dan Pembangunan: Perspektif Kritis*. LP3ES, Jakarta.
- Sutopo, Heribertus, 1988. *Pengantar Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis*. Pusat Penelitian Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Tjokroamidjoyo, Bintoro, 1986. *Perencanaan Pembangunan*. Gunung Agung, Jakarta.
- Tjokroawinoto, Moeljarto. 1987. *Politik Pembangunan Sebuah Analisis*. Konsep, Arah dan Strategi. PT Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Wahab, S.Abdul, 1990. *Analisis Kebijakan Negara*. PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Wibawa, Samudra. dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Sumber Lain:
 Buku Pedoman Umum P2KP, Edisi Revisi, 2005
 Buku Pedoman Teknis P2KP, 2004
 Daftar Isian Tingkat Pengembangan Kelurahan Pasir Kidul